

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* melalui peran KBRI Phnom Penh telah terimplementasi dalam kasus Repatriasi 28 WNI korban *online scam* di Poipet. Implementasi tersebut tercermin melalui berbagai upaya perlindungan, penanganan kasus, serta pemulangan WNI yang dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan sistemik yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius guna meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

Pertama, implementasi kebijakan perlindungan WNI berjalan melalui mekanisme organisasi yang terstruktur dan terlembagakan. KBRI Phnom Penh telah mengembangkan serta menjalankan SOP yang komprehensif, yang mencakup dua jalur prosedur berbeda untuk kasus *scam* dan *non-scam*, sistem asesmen TPPO yang sistematis, mekanisme koordinasi bilateral yang efektif, serta kapasitas penampungan yang bersifat adaptif terhadap dinamika kasus. Kasus repatriasi 28 WNI dari Poipet menunjukkan bahwa ketika seluruh tahapan SOP dapat dijalankan sesuai prosedur dan memenuhi indikator TPPO, negara mampu memberikan perlindungan yang komprehensif, mulai dari proses deteksi dini, penanganan dan pemulangan korban, hingga rehabilitasi pasca-kepulangan.

Kedua, terdapat kebaruan yang signifikan dalam prosedur penyelamatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Periode 2026 menandai terjadinya transformasi fundamental dalam pola penanganan kasus, yaitu dari model yang bersifat reaktif dan berbasis pengaduan individual (*hotline-driven*) menjadi model yang lebih responsif terhadap kedatangan korban dalam jumlah besar (*walk-in management*). Pergeseran ini mendorong KBRI untuk mengembangkan kapasitas baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, termasuk mengelola hingga 1.300 orang dalam penampungan, memproses ribuan asesmen TPPO, menegosiasikan

penghapusan denda *overstay* bagi 4.677 orang, serta memfasilitasi kepulangan 3.301 orang hanya dalam kurun waktu empat bulan. Pencapaian tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi organisasi yang sangat tinggi dalam menghadapi perubahan situasi di lapangan, sekaligus mencerminkan hasil dari investasi jangka panjang dalam membangun hubungan bilateral dan kepercayaan dengan otoritas Kamboja.

Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan kritis antara cakupan kebijakan yang ada dengan skala permasalahan di lapangan. Dengan estimasi 50.000 WNI yang terkait scam di Kamboja sementara KBRI hanya mampu menjangkau kurang dari 10.000 di antaranya, masih terdapat 'protection gap' yang sangat besar. Kesenjangan ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui peningkatan kapasitas KBRI, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih sistemik: penguatan penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku scam yang kembali, pengembangan program rehabilitasi yang efektif, peningkatan kerja sama bilateral dalam pertukaran data migrasi, dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah-daerah asal terbesar.

Keempat, MoU Indonesia-Kamboja yang ditandatangani pada Agustus 2023 merupakan tonggak penting dalam memformalkan kerangka kerja sama bilateral yang sebelumnya sangat bergantung pada hubungan informal. Meskipun MoU ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang detail, keberadaannya memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi koordinasi KBRI dengan otoritas Kamboja, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan intervensi kepolisian.

Kelima, perubahan paradigma yang didorong oleh KBRI Phnom Penh dari melihat scammer sebagai "korban yang harus diselamatkan negara" menjadi 'pelaku kejahatan yang tetap dilindungi hak dasarnya sebagai WNI' merupakan kontribusi kebijakan yang melampaui fungsi operasional dan masuk ke ranah pembentukan norma. Dengan konsisten menolak kategorisasi scammer sebagai PMI dan menegaskan bahwa scamming adalah tindak pidana, KBRI tidak hanya

menjalankan SOP tetapi juga memainkan peran dalam membentuk narasi kebijakan nasional yang lebih realistis dan akuntabel terhadap kondisi aktual di lapangan.

Sebagai penutup, analisis melalui Model II Allison mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi WNI dari *Human Trafficking* di Kamboja sangat ditentukan oleh kapasitas dan adaptabilitas organisasi KBRI sebagai sub-state actor. KBRI Phnom Penh telah membuktikan bahwa dengan dukungan kelembagaan yang memadai, jaringan bilateral yang kuat, dan staf yang berdedikasi, sebuah kedutaan besar mampu melampaui fungsi diplomatik konvensional dan bertransformasi menjadi garda terdepan perlindungan warga negara dalam menghadapi salah satu tantangan keamanan manusia paling kompleks di era globalisasi. Namun demikian, keberlanjutan dan peningkatan efektivitas perlindungan ini mensyaratkan penguatan kapasitas institusional yang konsisten, koordinasi lintas kementerian yang lebih baik, dan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kebijakan di Indonesia.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik di bidang hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu migrasi dan perdagangan manusia. Selain itu, rekomendasi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan perlindungan yang lebih efektif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

VI.2.1 Saran Teoritis

Pertama, penelitian ini merekomendasikan agar studi-studi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan WNI di luar negeri, secara lebih konsisten memanfaatkan Organizational Process Model (Model II) Allison sebagai kerangka analisis. Model ini terbukti memiliki kekuatan

eksplanatoris yang tinggi dalam menjelaskan mengapa implementasi kebijakan sering kali menghasilkan output yang berbeda dari apa yang dirancang di atas kertas oleh pengambil kebijakan di Jakarta. Analisis yang semata-mata berfokus pada level kehendak politik atau deklarasi kebijakan tanpa memperhatikan dinamika organisasi pelaksana di lapangan akan secara inheren menghasilkan gambaran yang tidak lengkap dan tidak akurat tentang bagaimana kebijakan benar-benar bekerja.

Kedua, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengkaji peran perwakilan diplomatik sebagai *sub-state actors* dalam penanganan berbagai isu non-tradisional, seperti perdagangan manusia (*Human Trafficking*), migrasi ilegal, dan kejahatan transnasional. Selama ini, literatur hubungan internasional konvensional umumnya memandang perwakilan diplomatik sebagai instrumen pelaksana kebijakan negara yang bersifat pasif. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik, seperti KBRI Phnom Penh, tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki kapasitas, otonomi, dan pengaruh dalam proses pembentukan serta implementasi kebijakan. Oleh karena itu, integrasi perspektif *street-level bureaucracy* yang berasal dari kajian administrasi publik ke dalam analisis kebijakan luar negeri dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan teoritis yang relevan dan berpotensi memperkaya kajian hubungan internasional.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan indikator evaluasi yang lebih komprehensif dan multidimensional dalam menilai efektivitas kebijakan perlindungan WNI. Selama ini, penilaian terhadap efektivitas kebijakan tersebut masih banyak bertumpu pada indikator kuantitatif yang relatif mudah diukur, seperti jumlah WNI yang berhasil dipulangkan atau jumlah kasus yang telah ditangani. Meskipun indikator-indikator tersebut memiliki nilai penting, penggunaannya belum mampu merepresentasikan berbagai aspek krusial lainnya, seperti kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban, efektivitas program rehabilitasi pasca-pemulangan, dampak jangka panjang terhadap tingkat kekambuhan kasus, maupun perubahan kondisi struktural yang menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi bermasalah. Oleh karena itu, pengembangan

kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh diperlukan agar penelitian di masa mendatang dapat menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan mendalam mengenai keberhasilan maupun keterbatasan kebijakan perlindungan WNI.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan agar studi mendatang mengkaji secara komparatif penanganan kasus WNI di berbagai negara tujuan, seperti Thailand, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Taiwan, dengan menggunakan kerangka analisis yang serupa dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan diplomatik dalam konteks yang berbeda, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik atau *best practices* yang dapat diadaptasi antarperwakilan Indonesia, serta menjelaskan bagaimana karakteristik sistem hukum dan politik negara tujuan membentuk ruang gerak dan keterbatasan perwakilan Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada WNI.

Kelima, penelitian ini mendorong dilakukannya kajian yang lebih mendalam mengenai interaksi antara aktor negara, khususnya perwakilan diplomatik, dan aktor non-negara seperti LSM, organisasi internasional (IOM dan UNHCR), serta komunitas diaspora dalam penanganan kasus *Human Trafficking*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KBRI Phnom Penh tidak bekerja secara mandiri, melainkan bergantung pada kolaborasi dengan berbagai mitra non-negara, seperti Caritas International, IJMI Foundation, dan IOM. Oleh karena itu, analisis yang lebih sistematis mengenai struktur kemitraan multi-aktor, mekanisme pembagian peran dan tanggung jawab, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja sama tersebut berpotensi memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian dan praktik tata kelola isu keamanan manusia transnasional (*transnational human security governance*).

VI.2.2 Saran Praktis

Pertama, penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan penguatan kapasitas institusional KBRI Phnom Penh secara lebih optimal. Penguatan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu penambahan staf konsuler yang memiliki kompetensi khusus dalam

penanganan kasus *Human Trafficking* dan kejahatan transnasional, peningkatan infrastruktur teknis melalui penambahan perangkat keimigrasian guna mempercepat penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), serta peningkatan anggaran operasional yang sejalan dengan besarnya kebutuhan penanganan kasus, terutama dalam pengelolaan shelter dan pelaksanaan repatriasi darurat WNI.

Kedua, penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang lebih terintegrasi dan responsif guna mendeteksi potensi peningkatan kasus WNI bermasalah di negara tujuan sebelum berkembang menjadi krisis. Sistem tersebut perlu didukung oleh integrasi berbagai sumber data, seperti tren penerbitan visa, laporan intelijen kepolisian, data migrasi dari BPS dan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta laporan perwakilan Indonesia di luar negeri. Dengan adanya sistem peringatan dini yang efektif, pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif melalui mobilisasi sumber daya dan respons kebijakan yang lebih proaktif, sehingga mampu mencegah keterlambatan penanganan ketika situasi telah mencapai tingkat yang lebih serius.

Ketiga, penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memperkuat program rehabilitasi dan reintegrasi pascarepatriasi yang lebih komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan program pelatihan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah asal, penerapan mekanisme pendampingan dan pemantauan jangka menengah selama minimal satu tahun setelah kepulangan, serta pelaksanaan program pemberdayaan keluarga guna mengatasi faktor ekonomi yang sering kali menjadi pendorong migrasi ilegal berulang. Dengan demikian, program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penanganan WNI setelah kembali ke Indonesia, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan sebagai upaya pencegahan jangka panjang.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara sebagai daerah asal utama WNI yang terlibat dalam kasus *online scam* di Kamboja, untuk memperkuat program sosialisasi dan literasi migrasi di tingkat komunitas. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat, tidak hanya mengandalkan metode konvensional seperti seminar atau iklan layanan masyarakat.

Pelaksanaannya dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan platform digital yang dekat dengan kelompok usia muda, disertai penggunaan contoh kasus nyata dengan tetap memperhatikan perlindungan identitas korban. Selain itu, pendekatan komunikasi yang melibatkan narasumber terpercaya dari komunitas, termasuk mantan korban yang bersedia berbagi pengalaman, perlu dioptimalkan karena dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan kampanye yang bersifat top-down dan kurang dekat dengan realitas sasaran.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara sebagai daerah asal utama WNI yang terlibat dalam kasus *online scam* di Kamboja, untuk memperkuat program sosialisasi dan literasi migrasi di tingkat komunitas. Program tersebut perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan platform digital yang relevan bagi generasi muda, disertai penggunaan kasus-kasus nyata sebagai media edukasi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban. Selain itu, keterlibatan narasumber yang memiliki kedekatan dan kredibilitas di lingkungan masyarakat, termasuk mantan korban yang bersedia berbagi pengalaman, perlu dioptimalkan karena dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko migrasi ilegal dan perdagangan manusia.

Keenam, penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terpadu dan berbasis target dalam menangani keterlibatan WNI dalam industri *online scam* di luar negeri. Rencana aksi tersebut perlu mencakup aspek pencegahan, penanganan, rehabilitasi pascarepatrisasi, serta penguatan kapasitas institusional secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi yang terstruktur dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar kementerian dan lembaga perlu diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara sinergis, efektif, dan komprehensif, mengingat permasalahan ini bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terpisah-pisah.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa upaya perlindungan WNI dari ancaman *Human Trafficking* dan berbagai bentuk kejahatan transnasional tidak dapat dibebankan kepada satu institusi semata, terlepas dari tingkat kapasitas yang dimilikinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KBRI Phnom Penh mampu menjalankan fungsi perlindungan secara efektif melalui dedikasi, kemampuan adaptasi, serta pembangunan hubungan bilateral yang konstruktif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang melampaui keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, keberlanjutan dan peningkatan efektivitas perlindungan WNI memerlukan dukungan yang lebih kuat dan terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan pemahaman publik mengenai dinamika *Human Trafficking* dan kejahatan transnasional menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem perlindungan WNI yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.